

Tembok Jl Cilebut Longsor, Pemkot Bogor Minta Bantuan Pemprov Jabar

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah mengajukan permohonan perbaikan tembok penguat tanah (TPT) di Jl Cilebut, Tanah Sareal, yang longsor kepada Pemprov Jawa Barat (Jabar). Hingga kini Pemkot Bogor masih menunggu kepastian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

"Kita sedang tunggu kira-kira berapa yang dapat ditangani dan berapa sisanya," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim saat dihubungi, Kamis (25/3).

Terakhir, Dedie mengatakan, Pemkot Bogor meminta melengkapi data untuk usulan tersebut pada bulan lalu (8/2). Usulan pembuatan TPT tersebut ditujukan pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov Jabar.

"Kewenangan TPT Saluran Empang Cisdane ada di Provinsi Jawa Barat. Kita

sudah sampaikan permohonan penanganannya ke Dinas SDA Jabar," ujarnya.

Dedie mengatakan dari Pemkot Bogor sudah memberikan titik-titik lokasi yang rencananya akan dibangun TPT. Dia berharap Pemprov Jawa Barat bisa segera menangani masalah tersebut.

"Yang harus diintervensi sekitar 600 meter panjang. Mudah-mudahan bisa ditangani oleh Dinas SDA Provinsi," ucapnya.

Sebelumnya, Dedie mengatakan luasan area terdampak cukup besar. Untuk itu Pemkot Bogor melakukan koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

"Masih akan dikoordinasikan dengan SDA Provinsi Jawa Barat. Karena setelah diteliti luasan dan cakupan area yang akan terdampak cukup banyak," ujarnya Senin (8/2) lalu. ● **gio**

8 | Nusantara



ROBOT PELAYAN RUMAH MAKAN CIPITAN PELAJAR SMK

Seorang siswi menata makanan yang akan diantar dengan "autobot waiters robot" di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Autobot School, Klaten, Jawa Tengah, (25/3). Hasil inovasi "autobot waiters robot" atau robot pelayan rumah makan ciptaan siswi SMK Pangudi Luhur Leonardo Klaten tersebut diharapkan dapat membantu pekerjaan manusia dalam mengantar makanan sehingga dapat mengurangi kontak langsung dengan manusia saat pandemi Covid-19.

IDN/ANTARA

DPU-PR Tahan Uang Muka Kontraktor Jalan Kandang Roda-Pakansari

DPU-PR tak mau gagalnya mereka dalam proyek pembangunan Auditorium UIN Jambi terjadi di lagi di proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor. Kami pun menerangkan alasan kami menahan uang muka agar mereka menunjukkan kinerja dan punya modal untuk melaksanakan proyek peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari," ujar Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan DPU-PR Kabupaten Bogor, Adriawan

CIBINONG (IM) - Demi terjaminnya keamanan proyek peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari yang dilaksanakan oleh PT Lambok Ulina, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Bogor akan menahan uang muka sebesar 20 persen dari nilai proyek Rp94 miliar.

Hal itu berkat konsultasi DPU-PR dengan Seksi Perdata Tata Usaha Negara (Datun)

Kejaksanaan Negeri Kabupaten Bogor dan Inspektorat Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

"DPU-PR sudah berkoordinasi dengan Seksi Datun Kejaksanaan Negeri Kabupaten Bogor dan juga Inspektorat. Hasilnya kami diimbau agar menahan uang muka PT Lambok Ulina yang mengerjakan proyek peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari," ujar Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan DPU-PR Kabupaten Bogor Adriawan kepada wartawan, Kamis (25/3).

Kepada PT Lambok Ulina, DPU-PR Kabupaten Bogor meminta penyedia jasa tersebut menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu karena perusahaan tersebut ramai digunjingkan gagal dalam proyek pembangunan Auditorium UIN Jambi.

"DPU-PR tak mau gagal-

nya mereka dalam proyek pembangunan Auditorium UIN Jambi terjadi di lagi di proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor. Kami pun menerangkan alasan kami menahan uang muka agar mereka menunjukkan kinerja dan punya modal untuk melaksanakan proyek peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari," sambungnya.

Adriawan menuturkan alasan lain DPU-PR "meloloskan" PT Lambok Ulina sebagai pemenang lelang berkontrak proyek insfarsstruktur yang merupakan bagian dari program Cibinong A City Beautiful karena beberapa hal.

"Selain karena tidak masuk dalam daftar hitam (black list) yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), alasan DPU-PR meloloskan

PT Lambok Ulina sebagai pemenang lelang berkontrak peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari karena juga memenuhi syarat teknis dan administrasi," tutur Adriawan.

Ia menjelaskan selain proyek senilai Rp94 miliar itu, pemenang lelang lainnya juga sudah memulai mengerjakan proyek rehabilitasi pedestrian yang berada di Jalan Kandang Roda-Pakansari dan Jalan Lingkar Pakansari.

"Proyek rehabilitasi pedestrian yang berada di Jalan Kandang Roda-Pakansari dan Jalan Lingkar Pakansari senilai Rp85,8 miliar dan Rp 31,9 miliar juga sudah mulai dikerjakan oleh masing-masing pemenang lelang yaitu PT Utama Mandala Perkasa dan PT Kemang Bangun Persada," jelasnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

PERSIAPAN UJI KOMPETENSI BAGI SISWA SMK TINGKAT AKHIR

Siswa jurusan kimia industri tingkat akhir SMKN 2 Cimahi melaksanakan simulasi uji kompetensi di laboratorium kimia SMKN 2 Cimahi, Jawa Barat, Kamis (25/1). SMKN 2 Cimahi menggelar simulasi dan pemberian konsultasi kepada siswa tingkat akhir dengan kapasitas murid sebanyak 30 persen untuk pelaksanaan uji kompetensi keahlian yang akan digelar pada 1 April 2021 mendatang sebagai salah satu syarat kelulusan.

Proyek Pasar 'Rakyat Juara' Cisarua Menunggu Arahan Pemprov Jabar

CISARUA (IM) - Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) proyek lanjutan pembangunan Pasar 'Rakyat Juara' Cisarua masih dalam revisi Pemprov Jawa Barat, sambil menunggu itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor sudah memproses lelang konsultan manajemen konstruksi.

"Disdagin masih menunggu arahan Pemprov Jawa Barat terkait DPA, sambil menunggu proses tersebut kami pun melelang konsultan manajemen konstruksinya," kata Kabid Perdagangan Disdagin Kabupaten Bogor, Fedri kepada wartawan, Kamis (25/3).

Ia menerangkan setelah terbangun, maka Pasar 'Rakyat Juara' Cisarua bukan pasar tradisional umumnya karena juga akan menjadi objek wisata kuliner dan spot foto selfie.

"Pasar 'Rakyat Juara' Cisarua tahap 3 ini akan ada tambahan 373 kios, baik itu 276 kios layaknya pasar tradisional plus 96 kios foodcourtnya. Sebagai kelayakan pasar plus objek wisatanya kami pun akan membangun tempat parkir dan menata taman-taman," terangnya.

Pengurus Pengeb Formi dan PRSI Kabupaten Bogor ini menuturkan karena waktu

atau target pekerjaan minimal Rp 120 hari maka secepatnya ia akan melelang proyek pembangunan Pasar 'Rakyat Juara' Cisarua.

"Target kami proyek pembangunan Pasar 'Rakyat Juara' Cisarua paling lama dilaksanakan Bulan Juli karena kami tak mau proyek ini mepep di akhir tahun 2021, yang jelas kami akan mulai membangunnya usai Hari Raya Idul Fitri karena kasih juga kalau pedagang berjualan sementara di tempat perdagangan sementara," tutur Fedri.

Ia menjelaskan dengan dibangunnya tahap ke 3 Pasar 'Rakyat Juara' Cisarua, maka revitalisasi Pasar Cisarua bisa dikatakan tuntas dan menghabiskan biaya total minimal Rp 41 milyar.

"Total anggaran untuk merehabilitasi Pasar Cisarua menjadi Pasar 'Rakyat Juara' Cisarua ialah minimal Rp 41 milyar dengan lama 3 tahun, Tahun 2019 anggaran sebesar Rp 10 milyar untuk membangun Blok B, Tahun 2020 anggaran sebesar Rp 6 milyar untuk membangun Blok D dan Tahun 2021 anggaran sebesar Rp 25 milyar untuk membangun Blok A dan Blok C (foodcourt)," jelasnya. ● **gio**

Jalan Alternatif Garut-Bandung Tertutup Longsor

GARUT (IM) - Bencana tanah longsor terjadi di Desa Rancasalak, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Rabu (24/3). Akibatnya, material longsor menutupi Jalan Raya Rancasalak, yang merupakan akses alternatif Garut-Bandung.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Tubagus Agus Sofyan mengatakan, longsor di wilayah itu terjadi pada Rabu sore. Tebing yang berada di sisi jalan longsor setelah terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

"Longsor menutup Jalan Rancasalak. Badan jalan yang tertutup kurang lebih 7 meter dengan ketinggian material lumpur 50 sentimeter," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (25/3).

Tubagus mengatakan, jalan itu sempat terputus total. Kendaraan roda dua maupun roda empat tak dapat melintasi jalan tersebut. Baru pada Kamis pagi, jalan sudah bisa kembali dilalui. Meski begitu, akses jalan masih dibuka-tutup lantaran masih dilakukan proses pembersihan.

"Alhamdulillah sekarang sudah bisa dilewati meski masih buka tutup. Kita sudah koordinasi dengan PUPR dan relawan untuk pembersihan agar jalur itu Bandung-Garut itu kembali bisa dilewati," ujar dia.

Tubagus menambahkan, BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk melakukan penanganan lanjutan di wilayah itu agar tidak kembali terjadi longsor. Namun, saat ini pihaknya masih fokus melakukan pembersihan. ● **pur**

Disdik Jabar Bahas Pendirian SKO



BANDUNG (IM) - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) mendukung pendirian Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Saat ini, wacana pendirian SKO masih dalam tahap pembahasan.

Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menjelaskan, pendirian SKO merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Dengan adanya SKO diharapkan mampu mewartakan bakat para siswa di bidang olahraga.

"Nantinya, di SKO siswa akan fokus dilatih bakat olahraganya," ungkap Kadisdik ketika dihubungi di Kantor Disdik Jabar, Jln. Dr. Radjiman No. 6, Kota Bandung, Kamis (25/3).

Dikatakan, siswa Jabar memiliki potensi luar biasa untuk menjadi atlet profesional. Sehingga, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengoptimalkan bakat tersebut agar nantinya prestasi yang diraih mampu mengharumkan nama bangsa.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan

Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Disdik Jabar, Edy Purwanto mengatakan, pendirian SKO ini masih dalam tahap pembahasan.

"Masih ada yang harus dikaji. Kita ingin dengar pendapat dari para stakeholder dan pemangku kebijakan yang bersinggungan dengan pendirian SKO ini, tuturnya.

Ia menjelaskan, salah satu unsur yang menjadi perhatian adalah penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan kurikulumnya. "SDM-nya harus kita siapkan dan kurikulumnya juga khusus. Itu harus jadi perhatian juga," imbuhnya.

Sedangkan perwakilan KONI Jabar, Agus Jamaedi mengatakan, hal lain yang harus diperhatikan adalah pemilihan bidang olahraga yang nantinya akan dibina. Apakah olahraga populer atau nonpopuler, namun berpotensi meraih prestasi.

Berdasarkan kebijakan Kemdikbud, nantinya SKO akan didirikan di Kabupaten Kuningan. ● **Iys**

Renja Pendidikan Jabar Harus Kembangkan Inovasi

BANDUNG (IM) - Pendidikan hari ini tak bisa lagi menggunakan cara lama. Sekarang dan ke depannya, teknologi digital harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendidik siswa. Dengan sentuhan inovasi, hal tersebut menjadi strategi dalam membangun visi "Jabar Juara Lahir Batin".

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Setiawan Wangsaatmaja saat membuka kegiatan Penyusunan dan Sinkronisasi Rencana Kerja (Renja) Bidang Pendidikan Provinsi Jabar Tahun 2022 di Mercure Hotel Karawang, Jln. Galuh Mas Raya Teluk Jembe, Kabupaten Karawang, Rabu (24/3).

Sekda mendorong penyusunan dan sinkronisasi renja bidang pendidikan harus mengembangkan inovasi seluas mungkin. "Inovasi bisa dilihat dari impact-nya.



Before dan after-nya harus kelihatan. Sektor pendidikan harus betul-betul (mengoptimalkannya) karena ini sangat memungkinkan," tuturnya.

Lebih jauh Sekda mengajak seluruh peserta renja untuk mengoptimalkan peran Forum Perangkat Daerah Bidang Pendidikan. Dengan pendekatan yang partisipatif, forum tersebut bisa dimanfaatkan untuk menampung dan menjangkit aspirasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dedi Supandi yang dimintai keterangannya,

Kamis (25/3) di Bandung mengatakan, salah satu fokus Renja di tahun 2022 adalah pengoptimalan desentralisasi anggaran dari Disdik Jabar ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan.

Kadisdik meyakini, desentralisasi akan mempercepat peningkatan mutu dan akses pendidikan.

Kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut diisi oleh berbagai narasumber dari berbagai instansi terkait, seperti Mendikbud, Kemdagri, dan Bunda PAUD Jabar. ● **Iys**

Telkom Gandeng Surveyor Indonesia dalam Verifikasi Pencapaian TKDN



BANDUNG (IM) - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memulai kegiatan verifikasi pencapaian TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Belanja Capital Expenditure (Capex) dan Operation Expenditure (Opex) tahun 2020.

Telkom menggandeng PT Surveyor Indonesia (Persero) yang telah ditunjuk sebagai Lembaga Surveyor Independen untuk TKDN oleh pemerintah. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen TelkomGroup dalam memajukan program peningkatan TKDN yang dicanangkan oleh Presiden RI.

Verifikasi pencapaian TKDN ini merupakan kegiatan akhir sebelum melakukan pelaporan kepada Kementerian terkait guna mendapatkan validasi dari surveyor independen atas penilaian mandiri yang dilakukan sebelumnya oleh pihak internal.

Rencananya PT Surveyor Indonesia akan melakukan post audit terhadap lebih dari 15.000 kontrak terhadap lebih dari 15.000 kontrak tahun anggaran 2020 untuk mendapatkan kesimpulan yang solid dari penyerapan porsi TKDN tersebut.

Ketua Satuan Tugas TKDN TelkomGroup, Moh. Riza Sutjipto, mengatakan bahwa langkah kolaborasi ini sebagai keseriusan Telkom dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan wujud keberpihakan korporasi kepada industri dalam negeri di lingkungan TelkomGroup.

Program P3DN sendiri menjadi perhatian utama pemerintah sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri serta Peraturan Menteri Perindustrian No 2 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN, di mana setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN diwajibkan dan diharapkan secara proaktif membentuk Tim P3DN.

Meningkatkan kompetensi karyawan tentang pemahaman kebijakan TKDN berikut teknis pengimplementasiannya dalam operasi perusahaan melalui pelatihan, menyempurnakan kebijakan pengadaan dan peraturan internal terkait lainnya. Juga menyusun guidance akselerasi dan membuat laporan implementasi TKDN secara mandiri (self-assessment). Kehadiran PT Surveyor Indonesia dalam verifikasi pencapaian TKDN Telkom menjadi sangat penting dan menjadi tafsiran final terhadap keakuratan besaran capaian TKDN yang dilakukan secara mandiri" jelas Riza.

Riza menambahkan, dalam menjalankan tugasnya, Satgas TKDN Telkom telah berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Nasional P3DN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai kementerian teknis industri telekomunikasi, guna mendapatkan arahan yang tepat dalam mengimplementasikan dan memaksimalkan penyerapan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan TelkomGroup.

Dalam perhitungan besaran capaian TKDN secara mandiri, TelkomGroup mencatat penyerapan sekitar 41.6% dari belanja Capex dan 92% dari belanja Opex 2020. Belanja Capex Telkom sendiri didominasi oleh penggunaan material fiber optic beserta jasa instalasinya, baik untuk pelanggan retail, bisnis maupun wholesale. Teknologi fiber optic memang menjadi infrastruktur utama yang digunakan untuk memberikan layanan Indi Home, sebagai layanan Broadband FTTH Telkom.

Ke depannya, Telkom mendorong alih teknologi perangkat aktif terminasi pelanggan (NTE) dari para technology owner untuk dapat dilakukan oleh industri lokal sehingga diharapkan dapat berdampak terhadap penurunan imporasi, penguatan struktur industri manufaktur nasional dan penyerapan tenaga kerja lokal. ● **Iys**